



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI
RESES MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2021-2022
KE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

*

**

**

*

JAKARTA 2022



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI
RESES MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2021-2022
KE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
13-17 Juli 2022

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

Dasar hukum yang dipergunakan dalam melaksanakan Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah:

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang tentang Tata Tertib:
 - a. Pasal 59 ayat (4) butir d: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah.
 - b. Pasal 59 ayat (5) butir f: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 28 Maret 2022.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 18 Mei 2022.

B. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan dalam rangka melaksanakan salah satu dari tiga fungsi DPR RI, yaitu fungsi pengawasan.

C. TUJUAN

1. Melihat dan mendengarkan penjelasan, berdialog, dan mendapatkan masukan langsung dari Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah, instansi terkait, masyarakat, serta *stakeholder* di bidang pertanian di Pulau Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama terkait:
 - a. Pelaksanaan Program *Food Estate* di Desa Umbu Pabal Selatan, Kec. Umbu Ratu Nggay, Kab. Sumba Tengah;
 - b. Penanganan Wabah Hama Belalang di Desa Hameli Ate, Kec. Kodi Utara, Kab. Sumba Barat Daya;
2. Mendengarkan penjelasan dari Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Daerah, instansi terkait, masyarakat, serta *stakeholder* di bidang kehutanan terkait Perdagangan Ilegal Satwa Jenis Burung Dilindungi serta Pemulihan Ekosistem dan Kawasan Hutan di Pulau Sumba, bertempat di Kawasan Hutan Lidung Poronumbu/Desa Kareka Nduku Selatan, Kec. Tanarighu, Kab. Sumba Barat.
3. Melihat dan mendengarkan penjelasan, berdialog, dan mendapatkan masukan langsung dari dari Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah, instansi terkait, masyarakat, serta *stakeholder* di bidang kelautan dan perikanan di Pulau Sumba, bertempat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama terkait *Destructive Fishing* di Pulau Sumba, bertempat di Desa Radamata, Kec. Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya.

II. SUSUNAN TIM

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Nusa Tenggara Timur diikuti oleh para Anggota Komisi IV DPR RI.

III. PELAKSANAAN

A. PELAKSANAAN DAN LOKASI KUNJUNGAN

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan pada tanggal 13-

17 Juli 2022 di Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya.

B. GAMBARAN UMUM

1. Profil Kabupaten Lokasi Kunjungan Kerja di Pulau Sumba

Pulau Sumba adalah sebuah pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Luas wilayahnya 10.710 km², dan titik tertingginya Gunung Wanggameti (1.225 m). Sumba berbatasan dengan Sumbawa di sebelah barat laut, Flores di timur laut, Timor di timur, dan Australia di selatan dan tenggara. Selat Sumba terletak di utara pulau ini. Di bagian timur terletak Laut Sawu serta Samudra Hindia terletak di sebelah selatan dan barat.

Secara administratif, pulau ini termasuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pulau ini sendiri terdiri dari empat kabupaten: Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Tengah, dan Kabupaten Sumba Timur. Kota terbesarnya adalah Waingapu, ibu kota Kabupaten Sumba Timur. Kota tersebut juga terdapat bandar udara dan pelabuhan laut yang menghubungkan Pulau Sumba dengan pulau-pulau lainnya di Indonesia seperti Pulau Sumbawa, Pulau Flores, dan Pulau Timor.

Kabupaten Sumba Tengah

Kabupaten Sumba Tengah adalah sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Ibu kotanya berada di Waibakul. Kabupaten ini adalah pemekaran dari Kabupaten Sumba Barat. Peresmian kabupaten ini dilakukan pada tanggal 22 Mei 2007 oleh pejabat pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bayang Amahu, S.H. Kabupaten Sumba Tengah terletak di Pulau Sumba bagian barat. Secara geografis, Kabupaten Sumba Tengah terletak pada 119°24'56,26" - 120°50'55,29" Bujur Timur dan 9°20'38,31" - 9°50'38,86" Lintang Selatan. Jaraknya sekitar dari 112 Kilometer dari Kota Waingapu. Luas wilayahnya 1.868.74 km².

Batas wilayah Kabupaten Sumba Tengah adalah: sebelah utara berbatasan dengan Laut Sawu, sebelah timur dengan Kabupaten Sumba

Timur, sebelah selatan dengan Samudera Hindia, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sumba Barat.

Bagian utara dan selatan wilayah Kabupaten Sumba Tengah merupakan pesisir meliputi Kecamatan Katikutana Selatan, Kecamatan Mamboro dan Kecamatan Umbu Ratu Nggay. Sedangkan bagian tengah berupa perbukitan dan dataran tinggi. Wilayahnya berada di ketinggian antara 0 - 900 mdpl dengan puncak tertingginya berada di Gunung Taculur (913 mdpl). Hampir sebagian wilayahnya memiliki kemiringan lahan 14°-40° dengan kemiringan ke arah utara. Seperti wilayah Pulau Sumba pada umumnya, jenis tanah dan batuan di Kabupaten Sumba Tengah didominasi oleh tanah mediteran serta batuan jenis batu gamping.

Kabupaten Sumba Tengah beriklim sabana tropis (Aw) dengan dua 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Iklimnya tergolong kering dengan curah hujan rendah karena hanya 5 bulan yaitu Januari sampai dengan April dan Desember yang keadaannya relatif basah. Sedangkan 7 bulan sisanya relatif kering dan gersang. Meski demikian, Kabupaten Sumba Tengah memiliki sungai-sungai maupun sumber-sumber mata air yang cukup. Sungai yang melewati wilayah Kabupaten Sumba Tengah di antaranya adalah Sungai Labariri, Bewi, dan Pamalar. Sebagian besar sungai-sungai besar di wilayah ini mengalir ke utara.

Kabupaten Sumba Barat

Kabupaten Sumba Barat adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Ibu kotanya berada di Kota Waikabubak. Kabupaten Sumba Barat pernah mengalami pemekaran wilayah menjadi Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kabupaten Sumba Tengah pada tahun 2007. Jumlah penduduk kabupaten Sumba Barat tahun 2021 sebanyak 149.641 jiwa.

Kabupaten Sumba Barat terletak di Pulau Sumba bagian barat dan merupakan kabupaten dengan luas wilayah terkecil. Secara geografis, Kabupaten Sumba Barat terletak pada 119°6'43,61" - 119°32'5,87" Bujur Timur dan 9°22'24,27" - 9°47'50,14" Lintang Selatan, dengan wilayah seluas 737,42 km².

Batas wilayah Kabupaten Sumba Barat adalah: sebelah utara Kabupaten Sumba Barat berbatasan dengan Laut Sawu, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sumba Barat Daya, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sumba Tengah.

Topografi Kabupaten Sumba Barat berupa pesisir, rangkaian pegunungan dan bukit-bukit kapur yang curam. Sebagian besar wilayah pesisirnya berada di bagian selatan berbatasan dengan Samudera Hindia. Ketinggian wilayahnya antara 0 - 800 mdpl, dengan karakteristik wilayah yang sama dengan wilayah lain di Pulau Sumba yang tergolong kering. Jenis tanah di Kabupaten Sumba Barat umumnya mediteran dengan jenis batuan batu gamping dengan kemiringan lahan 14° - 40°. Sebanyak 94,34% wilayah Kabupaten Sumba Barat digunakan sebagai lahan kering.

Kabupaten Sumba Barat memiliki iklim tropis basah dan kering (Aw) di pesisir dan iklim muson tropis (Am) di pedalaman dengan dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim hujan di Kabupaten Sumba Barat berdurasi ±6 bulan yakni pada bulan November-April, sedangkan musim kemarau berlangsung sejak awal bulan Mei hingga pekan-pekan pertama di bulan November.

Curah hujan tahunan cukup rendah hingga menengah yakni berkisar antara 800 - 1.900 mm per tahun dengan hari hujan sekitar 70 - 150 hari hujan per tahun. Suhu udara berkisar 25 °C - 33 °C dengan suhu minimum 21,8 °C dan maksimum 33,9 °C di musim kemarau. Sungai-sungai yang melintasi wilayah ini yaitu Sungai Wanokaka (Sungai Labariri), Sungai Kadengar, Sungai Kalada, dan Sungai Watupanggata.

Kabupaten Sumba Barat Daya

Kabupaten Sumba Barat Daya adalah salah satu kabupaten yang berada di Pulau Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Sumba Barat Daya merupakan pemekaran dari Kabupaten Sumba Barat dan dibentuk berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2007. Peresmian dilakukan oleh Penjabat Mendagri Widodo A.S. pada tanggal 22 Mei 2007. Pada tahun

2021 jumlah penduduk kabupaten ini sebanyak 317.000 jiwa. Pusat pemerintahan berada di kecamatan Kota Tambolaka.

Kabupaten Sumba Barat Daya adalah salah satu Kabupaten dari 4 (empat) Kabupaten yang ada di Pulau Sumba. Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki luas wilayah daratan sebesar 1.445,32 km² meliputi 11 (sebelas) wilayah kecamatan yang terdiri dari 129 desa dan 2 (dua) kelurahan. Secara geografis, Kabupaten Sumba Barat Daya terletak di bagian ujung barat Pulau Sumba yang tepatnya berada di antara 9°21'36.32"-9°43'37.55" Lintang Selatan dan 118°55'40.53"-119°24'40.76" Bujur Timur.

Batas wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya adalah: di sebelah sebelah utara berbatasan dengan Selat Sumba, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sumba Barat. Secara topografis, Kabupaten Sumba Barat Daya terbagi ke dalam lima kelompok wilayah topografis, yaitu:

- a. Wilayah gunung yang ditandai dengan kemiringan yang tinggi, wilayah ini meliputi Gunung Tanadaro;
- b. Wilayah perbukitan yang ditandai dengan kemiringan yang lebih rendah dari wilayah gunung;
- c. Wilayah undukan dekat laut yang ditandai undukan dan jurang yang curam sepanjang pantai selatan;
- d. Wilayah datar yang cukup luas dan dikelilingi bukit seperti dataran Anakalang; serta
- e. Wilayah dataran alluvial yang ditandai oleh dataran yang agak sempit sekitar sungai.

Keadaan kemiringan lahan di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya terdiri dari lahan datar hingga berbukit dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 0-850 m, sedangkan topografi kawasan sepanjang pantai relatif datar.

Kondisi hidrologi di Kabupaten Sumba Barat Daya sangat dipengaruhi oleh 3 (tiga) sumber air, yaitu air tanah bebas, air tanah tertekan, dan air permukaan tanah. Air tanah bebas merupakan sumber air tanah yang

mengikuti kondisi morfologi tanah, sedangkan air tanah tertekan terletak jauh di dalam tanah dengan lapisan yang kedap air. Sebagian besar penduduk di Kabupaten Sumba Barat Daya menggunakan air permukaan untuk keperluan sehari-harinya.

Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki 6 (enam) buah sungai dengan panjang yang cukup bervariasi. Sungai-sungai tersebut terletak di empat kecamatan, yaitu Sungai Pola Pare dan Sungai Wai Ha dengan panjang 18 km dan 9 km di Kecamatan Kodi Balaghar, Sungai Wee Wagha dan Sungai Wee Lamboro dengan panjang masing-masing 10 km terletak di Kecamatan Wewewa Selatan, Sungai Wee Kalowo dengan panjang 7 km di Kecamatan Wewewa Timur dan Sungai Loko Kalada sepanjang 16 km yang terletak di Kecamatan Loura.

Seperti wilayah lain di Indonesia, Kabupaten Sumba Barat Daya beriklim tropis dengan tipe tropis basah dan kering (Aw) yang ditandai dengan adanya dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya berlangsung pada periode November hingga April dengan rerata curah hujan lebih dari 150 mm per bulannya pada bulan-bulan tersebut. Sementara itu, musim kemarau di wilayah Sumba Barat Daya berlangsung pada periode Mei hingga Oktober. Suhu udara rata-rata di wilayah Sumba Barat Daya berkisar antara 21°-34°C terutama di wilayah pesisir dan dataran rendah. Tingkat kelembapan di wilayah ini pun bervariasi antara 60%-90%.

2. Program *Food Estate* di Kabupaten Sumba Tengah

Provinsi NTT merupakan wilayah yang dipilih sebagai salah satu kawasan *Food Estate* karena daerah ini merupakan salah satu daerah termiskin di Indonesia, sehingga perlu diperkuat ketahanan pangannya. 34% masyarakat NTT berada di angka garis kemiskinan dan panen padi di Sumba Tengah masih dilakukan setahun sekali dikarenakan permasalahan air yang tidak tersedia.

Kawasan Sumba Tengah ditetapkan sebagai kawasan *Food Estate* yang merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, dan peternakan dalam satu

kawasan. Pembukaan lahan dilakukan di sejumlah kecamatan dan dimulai sejak Tahun 2020. Tahun 2020 luasan pengembangan mencapai 5.000 ha (padi 3.000 ha dan jagung 2.000 ha). Saat ini kawasan *Food Estate* memiliki luas mencapai 10.000 ha yang terdiri dari 5.400 ha kawasan persawahan dan 4.600 ha lahan pertanian kering yang digunakan untuk pengembangan tanaman jagung dan peternakan. Pemerintah akan mengawal pengembangan *Food Estate* hingga dua tahun dan apabila program ini berhasil maka akan dilakukan pembangunan di daerah lain. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Pertanian, anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan *food Estate* untuk perbaikan pengairan dan bantuan alsintan, diantaranya:

Kegiatan Irigasi Pertanian Sumba Tengah														
Kegiatan	2020 (TP)		2021 (TP)		2022 (TP)		2020 (PEN)		2021 (PEN)		2022 (PEN)		Total	
	Unit	Anggaran	Unit	Anggaran	Unit	Anggaran	Unit	Anggaran	Unit	Anggaran	Unit	Anggaran	Unit	Anggaran
	TOTAL											31		2.915.000.000
RJIT	-	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	5	375.000.000	5	375.000.000	16	1.200.000.000	
Normalisasi	-	-	-	-	-	-	1	75.000.000	-	-	-	-	1	75.000.000
Perpompaan	-	2	240.000.000	2	240.000.000	-	-	3	360.000.000	-	-	7	840.000.000	
Perpipaan	-	-	-	-	-	-	-	2	200.000.000	-	-	2	200.000.000	
Embung	-	-	-	1	120.000.000	2	240.000.000	1	120.000.000	-	-	4	480.000.000	
Damparit	-	-	-	-	-	-	1	120.000.000	-	-	-	-	1	120.000.000

TAHUN	PROVINSI	KABUPATEN / KOTA	JENIS ALSINTAN	MERK ALSINTAN	Volume (unit)	Harga Unit (Rp)	Ongkir (Rp)	Total (Rp)	KETERANGAN
2020	NTT	Sumba Tengah	Traktor Roda 2	Quick Zena	20	36.210.000	92.160.000	816.360.000	Food Estate (Brigade)
2020	NTT	Sumba Tengah	Pompa Air	Beje BJ 80	20	14.980.000	69.596.500	369.196.500	Food Estate (Brigade)
2020	NTT	Sumba Tengah	Hand Sprayer	Tasco 425	13	405.000	2.730.000	7.995.000	Food Estate (Brigade)
2020	NTT	Sumba Tengah	Cultivator	Honda FJ500	10	14.820.000	34.600.000	182.800.000	Food Estate (Brigade)
2020 TOTAL					63		199.086.500	1.376.351.500	
2021	NTT	Sumba Tengah	Traktor Roda 4	Kiort DK4510	10	312.500.000	408.000.000	3.533.000.000	Food Estate (Brigade)
2021	NTT	Sumba Tengah	Traktor Roda 2	Quick Zena	103	36.210.000	474.624.000	4.204.254.000	Food Estate (Brigade)
2021	NTT	Sumba Tengah	Pompa Air	Honda WB30XN	20	5.350.000	50.200.000	157.200.000	Food Estate (Brigade)
2021	NTT	Sumba Tengah	Pompa Air	MBI P-100	5	20.000.000	23.760.000	123.760.000	Food Estate (Brigade)
2021	NTT	Sumba Tengah	Hand Sprayer	Tasco ES17	10	713.000	3.930.000	11.060.000	Food Estate (Brigade)
2021	NTT	Sumba Tengah	Cultivator	Ishoku IC 800	10	12.600.000	26.050.000	152.050.000	Food Estate (Brigade)
2021 TOTAL					158		986.564.000	8.181.324.000	

Berikut ini adalah lokasi Kecamatan yang terdapat *Food Estate* Sumba Tengah (FEST):

No	Kecamatan	Padi	Jagung
1	Katiku Tana	1.209	519
2	Katiku Tana Selatan	2.000	1.715
3	Umbu Ratu Nggay Barat	1.387	808

4	Umbu Ratu Nggay	564	461
5	Mamboro	240	1.097
Jumlah		5.400	4.600
Total Keseluruhan FEST Tahun 2021 (ha)			10.000

Evaluasi kegiatan Food Estate Sumba Tengah yang dilakukan Kementerian Pertanian:

- a. Tanam Padi 2020: 3.000 ha dan 2021: 5.400 ha, hasil produktivitas Padi naik 3,4 ton/ha menjadi 5,1 ton/ha. Kontribusi produksi Padi dari 9.700 ton menjadi 26.500 ton. Dari semula nilai Rp43,6 M naik menjadi Rp119,2 M.
- b. Tanam Jagung 2020: 2.000 ha dan 2021: 4.600 ha, hasil produktivitas dari 1-3 ton/ha menjadi 5,2 ton/ha. Kontribusi produksi Jagung dari 2.500 ton menjadi 23.000 ton. Dari semula Rp10 M naik menjadi Rp92 M.
- c. Terjadi peningkatan Indeks Pertanaman sebesar 1,0 (1 kali tanam menjadi 1,5-2 kali).
- d. Penurunan persentase penduduk miskin 0,22% dari tahun 2020 sebesar 34,49% menjadi tahun 2021 sebesar 34,27%. Penurunan paling signifikan diantara 23 kabupaten/kota lainnya di NTT.
- e. Pemasukan Modernisasi Brigade Alsintan:
 - 1) TR4 dari 0 unit menjadi 30 unit.
 - 2) TR2 dari 10 unit menjadi 180 unit.
 - 3) RMU dari 0 unit menjadi 1 unit.
 - 4) *Combine Harvester* dari 0 unit menjadi 22 unit.
 - 5) *Corn Sheller* dari 0 unit menjadi 10 unit.
- f. Pemasukan jasa Brigader Alsintan ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp1,8 M.
- g. Laporan Gerakan Pengendalian (Gerdal) Belalang Kembara di Pulau Sumba NTT:
 - 1) Mapping pergerakan belalang.
 - 2) Gerdal mekanik dan manual petani tangkap 12,2 ton belalang dikompensasi Rp5.000,00/kg.

- 3) Mengembangkan musuh alami belalang (jamur dan bakteri).
 - 4) Kerja sama riset belalang dengan UGM, IPB, UNDANA, dan UNIMO.
- h. Perubahan mindset petani dari sekedar memenuhi kebutuhan menjadi pertanian yang *profitable*.

Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam membangun *Food Estate* Sumba Tengah, diantaranya:

- a. Kendala: Terjadi kemunduran jadwal tanam dikarenakan serangan OPT belalang yang sangat masif, ketersediaan air, dan ketersediaan pupuk yang rendah.
- b. Permasalahan: Anggaran Ditjen TP sebagai PJ Sumba Tengah dilakukan beberapa kali revisi sehingga pestisida tidak bisa di-*supply* sesuai dengan kebutuhan di lapangan, belum dilaksanakan perencanaan pembangunan irigasi dan bendungan, serta tingginya harga pupuk *free market*.

3. Penanganan Hama Belalang di Pulau Sumba

Kasus eksplosif serangan hama belalang kumbara di Indonesia sudah terjadi sejak 140 tahun yang lalu, ketika menyerang tanaman padi di Pulau Halmahera pada 1877. Beberapa daerah provinsi yang pernah dilanda hama belalang yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sumatra Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan NTT.

Khususnya di Provinsi NTT, tercatat bahwa awal mula eksplosif serangan hama belalang kumbara terjadi di Pulau Sumba sejak 1973. Serangan belalang ini berlangsung sampai dengan 1975. Dua puluh empat tahun kemudian, belalang yang sama muncul lagi di Pulau Sumba dan berlangsung dari 1999 sampai 2002. Empat belas tahun kemudian yaitu 2016 terjadi lagi serangan hama belalang yang sama juga, kemudian menghilang sebentar saja, dan tahun 2017 kembali lagi secara eksplosif.

Pada keadaan ekosistem lingkungan hidup yang normal, maka perkembangbiakan dan populasi belalang tersebut normal juga. Karena burung-burung pemakan belalang akan menjadi predator yang menekan perkembangbiakan dan jumlah populasi belalang. Sehingga populasi

belalang tidak mengalami eksplosi dan menjadi hama pada tanaman pangan.

Sebaliknya, pada keadaan ekosistem lingkungan hidup yang tidak normal atau rusak, maka perkembangbiakan belalang tersebut akan leluasa dan jumlah populasinya terus meningkat. Karena burung-burung sebagai predatornya sudah sangat berkurang atau langka dan bahkan punah. Sehingga populasi belalang mengalami eksplosi dan menjadi hama pada tanaman pangan. Disamping itu, penyebab lainnya dikarenakan adanya pembakaran padang oleh investor baru yang membuka lahan dan perburuan burung besar-besaran.

Sejak bulan Maret-Mei 2022, hama belalang kembara dilaporkan menyerang tanaman pertanian dan area di sekitar rumah warga di Provinsi NTT. Salah satu daerah yang saat ini terdampak hama belalang Kembara yaitu Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT. Hama belalang ini telah memakan tanaman padi, jagung, dan kelapa jagung milik warga hingga habis di Desa Weekurra.

Pihak kecamatan bersama Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya serta masyarakat setempat telah turun ke lokasi berkumpulnya belalang untuk melakukan penyemprotan secara manual, namun masih mengalami kesulitan dan tidak mampu membasmi hama belalang.

4. Perdagangan Ilegal Satwa Jenis Burung Dilindungi serta Pemulihan Ekosistem dan Kawasan Hutan di Pulau Sumba

Ledakan populasi Belalang Kembara (*Locusta migratoria*) kembali terjadi di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Ledakan populasi mereka mengancam ketahanan pangan di pulau ini karena terjadi untuk kesekian kalinya selama beberapa tahun terakhir.

Sejak awal tahun ini, Pulau Sumba di Nusa Tenggara Timur diserbu belalang kembara (*Locusta migratoria manilensis*). Populasi belalang kembara meledak dan melahap daun dan batang padi serta jagung sehingga menggagalkan panen. Di Sumba Timur lebih dari 480 hektare padi dan 2.770 hektare jagung di 22 kecamatan luluh lantak diinvasi pasukan belalang.

Belalang kembara kemudian bergerak ke barat, menyerbu tiga kabupaten lainnya di Pulau Sumba. Di Sumba Tengah, mereka tak pandang bulu menggasak padi program food estate. Petani merugi Rp5-10 juta karena biaya merawat padi yang ludes dimakan belalang. Di kabupaten lainnya, petani telah panen, namun tetap merugi karena belalang juga memakan tanaman padi yang baru ditanam.

Ada banyak faktor yang mendorong ledakan populasi belalang kembara. Salah satunya perubahan pola cuaca akibat krisis iklim. Fenomena La Niña di tahun ini membuat musim hujan menjadi lebih panjang yang membuat waktu pembesaran populasi belalang ikut panjang. La Niña juga mengakibatkan hujan turun lebih awal di Sumba, yaitu Oktober 2021, dengan intensitas cukup tinggi. Selanjutnya, pembukaan hutan menjadi ladang terbuka untuk perkebunan tebu dan tanaman padi melalui program *Food Estate* ikut memperburuk serangan belalang. Tanaman tebu dan padi merupakan makanan favorit belalang kembara. Tersediannya pakan yang melimpah ini membuat belalang bereproduksi dengan cepat.

Rendahnya populasi beberapa burung pemangsa belalang di alam, ikut mendorong terjadinya serangan hama belalang. Berkurangnya populasi burung pemangsa belalang, diduga diakibatkan oleh maraknya perdagangan ilegal jenis burung dilindungi, terutama jenis yang merupakan predator belalang, disamping akibat kondisi ekosistem yang semakin tidak mendukung untuk dijadikan sebagai habitat jenis burung dimaksud.

Diperlukan komitmen peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam mengatasi perdagangan ilegal jenis burung berkicau di Pulau Sumba, dalam rangka mendukung konservasi keanekaragaman hayati spesies ini. Selanjutnya, Pulau Sumba, yang terletak di Provinsi NTT merupakan salah satu kawasan dengan jumlah keragaman endemik burung terbesar di Indonesia. Sedikitnya terdapat sekitar 215 jenis burung di Pulau Sumba, yang termasuk dalam 1,794 ragam jenis burung yang terdapat di seluruh Indonesia.

Sayangnya, beberapa dekade terakhir, telah terjadi deforestasi dan penurunan kualitas hutan di Pulau Sumba. Dengan adanya penurunan

jumlah dan kualitas kawasan hutan tersebut, dapat dipastikan jumlah ekosistem yang merupakan habitat burung ikut menyusut tajam. Di lain pihak, jenis satwa burung merupakan sebuah barometer keragaman ekosistem. Melalui burung, tumbuh pohon-pohon baru yang secara berkesinambungan menjadi hutan dan tempat tinggal beragam satwa.

Upaya perlindungan dan pengawetan burung endemik Sumba diantaranya dilakukan melalui pengelolaan habitat dan konservasi spesies. Pengelolaan habitat yang dilakukan meliputi aspek teknis tata kelola kawasan hutan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Sedangkan konservasi spesies adalah program yang menyorot secara langsung perlindungan spesies burung kunci di Pulau Sumba. Burung kunci yang dimaksud adalah delapan burung endemik dan lima burung paruh bengkok.

5. ***Destructive Fishing*** di Pulau Sumba

Pemerintah saat ini tengah berupaya keras dalam menangani *illegal fishing*. Banyak kapal-kapal asing yang kemudian ditangkap dan ditenggelamkan karena pelanggaran jalur penangkapan atau kepemilikan dokumen perizinan yang palsu.

Namun, masalah di perairan Indonesia, termasuk perairan Pulau Sumba, ternyata bukan hanya pada *illegal fishing*. Masalah lain yang tak kalah seriusnya adalah *destructive fishing*, yang justru dilakukan oleh nelayan lokal dengan cara pengeboman dan pembiusan ikan, dengan menggunakan bahan peledak seperti bom ikan atau bahan beracun yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan. Masalah *destructive fishing* ini sebenarnya telah muncul sejak 20-30 tahun lalu, namun hingga sekarang belum ada formulasi yang tepat untuk penyelesaiannya.

Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), terdapat tiga jenis aktivitas *destructive fishing* yaitu: 1) penangkapan ikan dengan penggunaan racun potas (*cyanide fishing*), 2) penangkapan ikan menggunakan bom (*dynamite fishing*), serta 3) penangkapan ikan menggunakan setrum.

Penangkapan ikan dengan cara merusak ini begitu marak, karena dengan menggunakan bom ikan dapat memberi keuntungan bagi pelaku. Hasil tangkapan jadi lebih banyak, cepat, dan caranya mudah. Bahkan dalam sekali pengeboman ikan, hasil tangkapan ikan bisa lebih dari seribu kilogram.

Kegiatan ini tentu dilarang dan diatur dalam undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, disebutkan bahwa setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, menggunakan alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu serta merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan. Jika diketahui dan terbukti, orang yang melakukan hal tersebut akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar.

Penggunaan racun untuk menangkap ikan ternyata memiliki dampak yang lebih parah ketimbang bom ikan. Pembusuan yang dilakukan untuk menangkap ikan hias dampaknya lebih besar dari pembusuan ikan terhadap ikan karang untuk konsumsi. Hal ini terjadi karena titik penyemprotan racun untuk menangkap ikan hias akan lebih memperhatikan arus air, sehingga racun lebih banyak mengenai tubuh karang.

Sementara untuk penggunaan setrum, akan menimbulkan efek kejut sehingga ikan pingsan bahkan mati. Lebih lanjut dampaknya akan merusak keberlanjutan populasi ikan di area tersebut.

Adapun, bom ikan dapat membuat kematian masal pada algae bersel satu yang hidup dalam jaringan tubuh karang. Algae tersebut bersimbiosis dengan hewan pembentuk terumbu karang sebagai penghasil utama oksigen dan nutrisi melalui proses fotosintesis. Terumbu karang yang rusak karena peledak dapat pulih kembali. Namun, butuh waktu lama. Dalam kondisi perairan yang baik, pembentukan 1 cm terumbu karang perlu waktu sekitar satu tahun. Maka untuk membentuk 100 cm terumbu karang butuh waktu hingga 100 tahun.

Dampak dari pengeboman ikan ini juga dapat mengganggu keseimbangan ekologi, di mana rantai makanan di laut ikut terganggu. Kerusakan terumbu karang berakibat terjadinya pengurangan populasi biota penghuni terumbu karang, kemudian akan memengaruhi populasi predator. Lebih lanjut lagi, hal ini bisa menyebabkan organisme punah perlahan maupun massal.

C. HASIL KUNJUNGAN KERJA

1. Pelaksanaan Program *Food Estate* di Desa Umbu Pabal Selatan, Kec. Umbu Ratu Nggay, Kab. Sumba Tengah

- a. Lahan sawah irigasi yang berada di Kabupaten Sumba Tengah untuk satu kali panen terdapat 1.664 ha dan dua kali panen 1.028 ha. Sementara lahan sawah tadah hujan terdapat 4.909 ha dengan realisasi panen dalam setahun sebanyak satu kali;
- b. Dalam merealisasikan Program *Food Estate* di Kabupaten Sumba Tengah, Pemerintah mengalami beberapa permasalahan dan tantangan baik dari subsistem hulu hingga subsistem penunjang lainnya, diantaranya:
 - 1) Lahan yang digunakan untuk pembangunan program *Food Estate* sebagian besar merupakan lahan tadah hujan sehingga membutuhkan irigasi dalam mendukung pembangunan sawah. Sejauh ini irigasi/drainase dan dukungan alsin praolah tanah yang masih belum optimal, kurang didukung dengan jalan usaha tani sehingga saat ini masih belum memadai, serta NTT merupakan kawasan yang masih belum tersebut pertanian secara maksimal sehingga berpotensi untuk dibangun PATB (Perluasan Areal Tanam Baru);
 - 2) Untuk subsistem *on farm* dan hilir dalam program *Food Estate* membutuhkan ketersediaan benih unggul, pupuk, obat-obatan, mekanisasi (TR 4, TR 2, transplanter, drone, alat panen), *Dryer-RMU*, Alsin pascapanen non padi, Alsin *processing*, pengemasan, *Cold Storage*, gudang, tenaga kerja, dan kelembagaan;
 - 3) Disamping itu, dalam mendukung realisasi program *Food Estate*, Pemerintah harus menyediakan pasar dalam menampung produksi

- dari lahan *Food Estate*. Adapun kebutuhan dalam menyempurnakan sistem pertanian berkelanjutan di lahan *Food Estate*, masyarakat membutuhkan transportasi dan logistik, pasar modern, pasar online, pasar tradisional, koperasi/toko tani, serta ekspor; serta
- 4) Adanya regulasi yang mendukung, investasi/pembiayaan, riset dan inovasi terkait dengan pertanian di program *Food Estate*, vokasi dan penyuluhan terkait dengan pertanian, serta infrastruktur pendukung lainnya (seperti listrik, air bersih, dll).
- c. Di Tahun 2021, potensi lahan yang digunakan untuk program *Food Estate* sebesar 5.400 ha (untuk luas panen padi) dan 4.600 ha (untuk lahan jagung). Lahan sawah tersebut memiliki produktivitas rata-rata 5,1 ton/ha dengan total produksi 27.540 GKG atau setara dengan Rp10,5 miliar. Sedangkan di Tahun 2020, luas lahan yang digunakan untuk program *Food Estate* sebesar 5.000 ha (khusus untuk lahan sawah sebesar 3.000 ha) dengan produktivitas rata-rata 4,6 ton/ha;
 - d. Sebelum ada program *Food Estate*, pada Tahun 2019, lahan sawah hanya memiliki produktivitas 2-2,3 ton/ha;
 - e. Secara kelembagaan, telah terbentuk gapoktan bersama untuk melakukan okupasi hasil panen dengan menggunakan modal tetap, dan berfungsi untuk menjaga stabilitas harga gabah ditingkat petani. Lokasi yang dikunjungi merupakan lokasi *Rice Milling Unit* yang dikelola oleh Gapoktan Bersama Pro Oli Mila Parewa Tana Desa Umbu Pabal Selatan Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat. *Rice Milling Unit* tersebut merupakan bantuan dari Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021 dengan nilai Rp1,6 miliar. Luas bangunan RMU & *Dryer* sebesar 216 m² dengan kapasitas RMU sebesar 2 ton/jam dan *Dryer* sebesar 10 ton/8 jam (dengan kadar air 14% serta biaya pengeringan sebesar Rp300,00/kg yang digunakan untuk perawatan dan operasional). Dengan adanya bantuan RMU & *Dryer* dari Pemerintah Pusat, masyarakat dapat menghasilkan beras premium dengan brand lokal “**Pro Oli Mila**”;

- f. Adanya *Dryer* dan RMU akan membantu petani untuk memproduksi beras dengan estimasi 17.631 ton atau setara dengan Rp229 miliar. Harga beras di tingkat petani di Sumba Tengah sekitar Rp8.000,00/kg;
- g. Pembelian beras masih dibeli oleh beberapa pengusaha lokal yang memiliki RMU dan diharapkan kedepan bisa memasok ke Perum Bulog, Pasar Modern, serta Hotel, restoran, dan kafe;
- h. Dengan hadirnya program *Food Estate* di Sumba Tengah bertujuan untuk mengantisipasi cadangan pangan dan menjaga kestabilan pangan bagi masyarakat di Kabupaten Sumba Tengah. Sebelum program *Food Estate* hasil produksi jagung mencapai 2,5 ton/ha namun setelah masuk menjadi program *Food Estate* hasil produksi jagung mencapai 6 ton/ha. Sedangkan untuk hasil produksi padi sebelum adanya program *Food Estate* mencapai 3 ton/ha dan setelah adanya program *Food Estate*, produksinya mencapai 4,7-5 ton/ha;
- i. Dengan adanya RMU, masyarakat dapat menghasilkan padi beras 150 ton. Hal ini sangat membantu petani dalam menjaga kestabilan produksi padi;
- j. Dasar penempatan program *Food Estate* di Kabupaten Sumba Tengah dikarenakan angka kemiskinan mencapai 34% dan tingkat kemiskinan Provinsi NTT mencapai 16%. Sekitar 84% masyarakat Sumba Tengah adalah petani yang tidak tamat SD sehingga Presiden RI mengusulkan agar program *Food Estate* dilakukan di Kabupaten Sumba Tengah. Presiden RI juga menyatakan bahwa target produksi dan produktivitas padi dan jagung di Kabupaten Sumba Tengah minimal mencapai 5-6 ton/ha dan panen setiap tahun mencapai 2 kali;
- k. Beberapa aspirasi yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Tengah dan petani program *Food Estate*, diantaranya:
 - 1) Masyarakat membutuhkan dukungan Komisi IV DPR RI dan Pemerintah untuk menyediakan air melalui embung/bendungan sehingga panen padi dapat dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun;
 - 2) Di Tahun 2020, masyarakat sangat bangga adanya program *Food Estate* dan banyak peningkatan produksi pangan salah satunya

produk hortikultura. Namun, produksi pertanian hanya bisa dilakukan 1 kali dalam setahun dikarenakan tidak adanya ketersediaan air/kekurangan air;

- 3) Mengharapkan agar tidak adanya hama belalang;
- 4) Masyarakat program *Food Estate* juga memiliki kendala yaitu mobilisasi hasil panen baik ke RMU maupun ke pasar yang sangat terbatas; dan
- 5) Meminta dukungan kepada Komisi IV DPR RI dan Pemerintah terkait ketersediaan alsintan yang dapat menolong masyarakat untuk melakukan panen di lahan Kabupaten Sumba Tengah.

Rekomendasi:

- a. Komisi IV DPR RI mendukung masyarakat program *Food Estate* mendapatkan bantuan sarana prasarana pertanian Tahun Anggaran 2023 guna meningkatkan produksi padi di Kabupaten Sumba Tengah;
 - b. Komisi IV DPR RI akan memperjuangkan kepada Pemerintah terkait dengan ketersediaan air. Disamping itu, Komisi IV DPR RI juga mendukung adanya JUT dan JIT di kawasan Kabupaten Sumba Tengah dalam mendukung keberlangsungan program *Food Estate*; serta
 - c. Komisi IV DPR RI mendukung ketersediaan kendaraan roda 4 yang digunakan untuk mobilisasi petani dalam menyalurkan hasil panen.
- 2. Diskusi mengenai Perdagangan Ilegal Satwa Jenis Burung Dilindungi serta Pemulihan Ekosistem dan Kawasan Hutan di Pulau Sumba di Kawasan Hutan Lidung Poronumbu/Desa Kareka Nduku Selatan, Kec. Tanarighu, Kab. Sumba Barat**
- a. Kawasan hutan Kabupaten Sumba Barat adalah seluas 7.526,52 hektar atau 13,93% dari luas daratan wilayah Kabupaten Sumba Barat. Kerusakan kawasan hutan yang terjadi di wilayah Sumba Barat terutama disebabkan oleh *illegal logging*, pembabatan hutan yang tidak bertanggung jawab, sistem perladangan berpindah-pindah, dan adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan ekonomi jangka pendek yang

menimbulkan keinginan untuk mengeksploitasi hasil hutan secara berlebihan sehingga merusak sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kondisi tersebut mengancam kelestarian dan mengarah pada kepunahan 70 jenis tumbuhan yang merupakan habitat asli serta 9 jenis burung langka yang ada. Meningkatnya kerusakan hutan juga merupakan salah satu implikasi dari pengalihan kewenangan urusan bidang kehutanan dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi yang mengakibatkan kurang efektif dan efisiennya pelaksanaan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kehutanan, baik dari segi sumber daya manusia yang ditempatkan atau diperbantukan, juga dari segi penganggarannya.

- b. Di Kabupaten Sumba Barat terdapat kawasan hutan lindung seluas 1.190,85 ha yang meliputi: 1) Kawasan Hutan Poronumbu seluas 1.142,06 ha yang tersebar di Kecamatan Tana Righu dan Kecamatan Loli; serta 2) Kawasan Hutan Ranga Dongu seluas 48,79 ha yang tersebar di Desa Sobarade, Kecamatan Kota Waikabubak dan Desa Beradolu Kecamatan Loli dan Kabupaten Sumba Tengah.

Hutan lindung yang merupakan tempat tinggal berbagai burung endemik, selama beberapa dekade terakhir mengalami deforestasi dan penurunan kualitas hutan di Pulau Sumba yang mengakibatkan penurunan keragaman ekosistem hingga penurunan populasi burung endemik. Penurunan populasi burung endemik juga diakibatkan oleh adanya perburuan dan perdagangan ilegal. Selama beberapa tahun terakhir terdapat sejumlah kasus penyelundupan burung yang dilindungi dari Sumba ke luar Sumba yang terjadi, beberapa berhasil digagalkan oleh pihak yang berwenang. Hal ini menjadi isu penting yang perlu menjadi perhatian kita bersama demi mendukung konservasi keanekaragaman hayati spesies-spesies burung yang dilindungi di Pulau Sumba.

Secara tidak langsung ketidakseimbangan ekosistem yang terjadi di kawasan hutan, mengakibatkan terjadinya hama belalang yang menyerang kawasan di Pulau Sumba, termasuk Kabupaten Sumba Barat. Hama belalang tersebut menyerang pada saat Musim Tanam II

Tahun 2022. Adanya serangan hama belalang di Kabupaten Sumba Barat cukup menyebabkan banyak kerugian dan dapat mengancam ketahanan pangan di Kabupaten Sumba Barat. Belalang kembara menyerang sejumlah desa di Kecamatan Loli dan Tana Righu dengan cakupan seluas 342 ha. Dari luas wilayah yang terserang, pengendalian hanya dapat dilakukan pada 24 ha lahan, dikarenakan keterbatasan peralatan pengendalian belalang kembara yang tersedia pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Barat.

- c. Kabupaten Sumba Barat memiliki potensi yang besar untuk pengembangan peternakan. Pada tahun 2021, populasi ternak besar yang paling banyak di Kabupaten Sumba Barat adalah kerbau dengan jumlah 7.191 ekor. Selain kerbau, ternak besar unggulan Sumba Barat yakni kuda dengan populasi mencapai 2.781 ekor dan sapi dengan populasi mencapai 1.478 ekor pada tahun 2021. Selain ternak besar, ternak kecil yang terdapat di daerah ini yakni kambing sejumlah 5.813 ekor, babi 3.347 ekor serta unggas yakni ayam buras sejumlah 197.659 ekor, ayam pedaging sejumlah 59.680 ekor dan itik sejumlah 4.883 ekor.

Kondisi terkait kesehatan hewan ternak di Kabupaten Sumba Barat dapat saya sampaikan bahwa masih terjadi penyakit hewan seperti penyakit Surra dan ASF. Penyakit Surra masih terjadi di Kecamatan Wanukaka, Lamboya, Loli, dan Kota Waikabubak dengan jumlah kasus sebanyak 42 kasus dan berpotensi meningkat, mengingat lalu lintas antar Kabupaten yang sering terjadi, terutama lalu lintas dengan Kabupaten Sumba Timur dimana penyakit Surra saat ini sedang mengalami peningkatan. Penanganan penyakit Surra masih mengalami keterbatasan dalam penyediaan obat penyakit Surra.

Saat ini juga terjadi ancaman wabah Penyakit Kuku dan Mulut di Indonesia, yang juga menjadi ancaman bagi NTT dan Sumba Barat. Walaupun saat ini belum ada kasus PMK, penting sekali untuk melakukan pengawasan lalu lintas ternak di wilayah Sumba Barat. Untuk itu, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Penanganan Penyakit

Kuku dan Mulut sebagai langkah antisipasi pencegahan dan penanganan PMK, yang berkerja sama dengan Kodim 1613 Sumba Barat dan Polres Sumba Barat.

- d. Beberapa aspirasi yang disampaikan oleh Bupati Sumba Barat adalah sebagai berikut:
- 1) Permohonan Sarana dan Prasarana Pertanian di Kabupaten Sumba Barat, antara lain terkait dengan Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian (Traktor Besar, Hand Traktor, Perontok Multi Guna, Mesin Potong Padi, Pompa Air, dan Lain-lain).
 - 2) Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana (Pembangunan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier, Pembangunan Embung pertanian, Pembangunan Sumur Tanah Dalam dan dangkal, Jalan Usaha Tani dan Lain-lain) serta Pembangun/renovasi Balai Penyuluh Pertanian di beberapa Kecamatan di Kabupaten Sumba Barat.
 - 3) Penyakit ASF pada ternak babi untuk saat ini sudah mulai terkendali dengan adanya penetapan *bio security* yang baik. Namun, dengan masih adanya sejumlah kasus ASF, pemerintah daerah tetap berupaya memberikan perhatian agar kasus ASF tidak merebak seperti pada tahun sebelumnya. Penanganan kasus ASF juga mengalami kendala yakni belum adanya vaksin untuk pengendalian ASF serta belum adanya serum untuk membantu meningkatkan imunitas tubuh ternak babi yang tersedia dan keterbatasan vitamin dan obat-obatan lainnya. Sehingga kami mengharapkan bantuan obat-obatan, vaksin, maupun serum untuk penangana permasalahan penyakit hewan/ternak di Kabupaten Sumba Barat.
 - 4) Permohonan tambahan bantuan ternak seperti pengembangan ternak sapi berjumlah 300 ekor, ternak kambing 300 ekor, ternak babi 600 ekor dan ternak ayam jenis KUB 6000 ekor, jenis pedaging 12.000 ekor dan jenis joper 12.000 ekor yang tersebar di 6 Kecamatan Kabupaten Sumba Barat.

- 5) Di Kabupaten Sumba Barat terdapat atraksi Pasola sebagai produk Pariwisata di Kabupaten Sumba Barat, maka kami mengharapkan adanya bantuan ternak Kuda Pasola di 3 Kecamatan yang melaksanakan ritual adat pasola sebanyak 60 ekor. Semoga peternakan dapat menjadi sektor unggulan Sumba Barat di masa depan yang mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah ini.
 - 6) Di bidang perikanan Sumba Barat berpotensi untuk mengembangkan ikan air tawar seperti ikan nila, gurame, ikan mas, dan ikan lele, sehingga diperlukan bantuan indukan unggul sebagai benih, karena indukan yang sekarang ada di balai benih sudah tua dan kurang produktif.
 - 7) Permohonan bantuan kapal dan alat tangkap ikan, cumi dan gurita. Serta juga yang tidak kalah penting terkait dengan pengembangan rumput laut di wilayah utara Kecamatan Tanarighu.
- e. Beberapa aspirasi yang disampaikan oleh Wakil Masyarakat Kabupaten Sumba Barat dalam kesempatan diskusi adalah sebagai berikut:
- 1) Permohonan rehabilitasi mata air di sekitar Desa Kareka Ndal Selatan serta kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang rusak akibat adanya perusakan hutan/penebangan hutan yang bukan dilakukan oleh masyarakat.
Dalam hal ini program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, bukan oleh Pemerintah Kabupaten, sehingga kurang fokus dalam pencapaian target program/kegiatan.
 - 2) Permohonan paralonisasi untuk mengalirkan air bersih dari sumber mata air hutan yang ada, untuk dapat disalurkan kepada 5 (lima) wilayah di sekitarnya untuk diakses/dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama untuk kegiatan pertanian dan perikanan.
 - 3) Permohonan bantuan pembangunan kolam ikan serta benih ikan nila dan lele dumbo dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di beberapa desa di Kabupaten Sumba Barat.

- 4) Saat ini terdapat hasil hutan bukan kayu yang sudah banyak diproduksi oleh Kelompok Tani Hutan yang menjadi binaan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Sumba Barat, seperti kemiri hutan, jahe merah, kopo, dan lain-lain. Namun diperlukan fasilitasi untuk pengembangan usaha, termasuk di dalamnya penanganan produk pascapanen serta dukungan untuk kepastian pasar hasil produksi.
- f. Beberapa tanggapan atas aspirasi yang disampaikan oleh Wakil Masyarakat Kabupaten Sumba Barat adalah sebagai berikut:
- 1) Ibu Julie Sutrisno Laiskodat selaku Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Nusa Tenggara Timur akan memfasilitasi pengembangan usaha KTH di Kabupaten Sumba Barat, dengan standar kualitas produk yang berlaku di Dekranasda Provinsi NTT, seperti pemenuhan standar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta standar lainnya.
 - 2) Ditjen Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan akan memfasilitasi penyediaan bibit produktif siap tanam untuk rehabilitasi hutan dan lahan dalam rangka pemulihan ekosistem dan kawasa hutan di Kabupaten Sumba Barat.

Rekomendasi:

- a. Komisi IV DPR RI mendorong dilakukannya penyediaan bibit produktif siap tanam untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dalam rangka pemulihan ekosistem dan kawasan hutan lindung dan hutan produksi oleh Ditjen Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Balai PDASRH Benain Noelmina.
- b. Komisi IV DPR RI mendorong dilakukannya pemulihan ekosistem dan kawasan konservasi oleh Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Balai Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti (Balai TN Matalawa).

- c. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga ekosistem dan kawasan hutan di Pulau Sumba dalam rangka menjamin kualitas sumber daya air yang berguna bagi kelangsungan dan kesejahteraan masyarakat, baik generasi saat ini maupun generasi yang akan datang.
- d. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindaklanjuti proses penegakan hukum atas seluruh tindak kejahatan perusakan hutan serta perdagangan ilegal satwa liar dilindungi di Pulau Sumba, agar dapat memberika efek jera, dalam rangka menjaga keanekaragaman sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan sosialisasi dalam rangka mencegah tindak pidana kejahatan perusakan hutan dan perdagangan ilegal satwa liar dilindungi.
- e. Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi kepada Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan memfasilitasi pengembangan usaha Kelompok Tani Hutan (KTH) di Kabupaten Sumba Barat.
- f. Komisi IV DPR RI akan mengawal realisasi bantuan/program aspirasi yang akan disampaikan oleh Bupati Sumba Barat kepada Mitra Komisi IV DPR RI, baik Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

3. Penanganan Wabah Hama Belalang di Desa Hameli Ate, Kec. Kodi Utara, Kab. Sumba Barat Daya

- a. Hama belalang menyerang tanaman pertanian warga di Kabupaten Sumba Barat Daya dalam beberapa hari terakhir berasal dari Sumba bagian timur. Dalam mengatasi permasalahan hama belalang tersebut, pihak kecamatan bersama Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya serta masyarakat setempat telah turun ke lokasi berkumpulnya belalang untuk melakukan penyemprotan secara manual pada saat

malam hari, walaupun dalam kegiatannya masih mengalami kesulitan dan tidak mampu membasmi hama belalang. Disamping itu, upaya yang dilakukan masyarakat dalam membasmi hama belalang adalah dengan menggunakan jaring. Pemerintah Daerah mendorong masyarakat dalam membasmi hama belalang menggunakan jaring dengan memberikan upah senilai Rp5.000,00/kg;

- b. Saat ini Kementerian Pertanian bekerja sama dengan akademisi melakukan pengujian agensia hayati/bakteri merah yang berpotensi dapat menghentikan populasi hama belalang;
- c. Sejak Tahun 2013, kondisi iklim menyebabkan hama belalang kembara mengalami peningkatan dan masyarakat telah mengupayakan untuk melakukan pembasmian mulai dari pengendalian mekanik (penangkapan belalang dengan pemberdayaan masyarakat), menggunakan pestisida kimia (tidak ramah lingkungan), serta menggunakan pendekatan APH (Agensia Pengendali Hayati yang ramah lingkungan). Salah satunya merupakan hasil eskplorasi dari Ditjen Tanaman Pangan (yaitu berupa bakteri merah). Saat ini masih dalam tahap uji efektivitas dan akan dilakukan uji coba keamanan hayati bagi manusia. Disamping itu, Kementerian Pertanian dan akademisi juga menggunakan alternatif asap cair yang berfungsi untuk memandulkan telur hama belalang dan mengusulkan untuk menghidupkan kembali predator alami/burung melalui penangkaran yang hingga saat ini sudah mulai berkurang;
- d. Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki Lahan jagung sebesar 35 ribu ha dan mendistribusikan hasil produksinya ke Surabaya sebesar 1000 ton;
- e. Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) di Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan program unggulan Pemerintah Provinsi NTT. TJPS dirancang untuk menyelesaikan dua permasalahan pembiayaan pembangunan pertanian dan terkait dengan penganganan pemasaran. Saat ini belum optimal dan masyarakat memiliki beberapa permasalahan/tantangan;

- f. Terkait dengan aspek pemasaran, petani sudah bekerja sama dengan >5 *offtaker* yang akan men-*takeover* semua produksi jagung yang diproduksi petani TJPS. Sehingga nanti akan berdampak pada laju luas tambah tanam jagung. Tahun 2022, Pemerintah Daerah sudah mencanangkan 105 ribu ha jagung untuk ditanam pada musim tanam (Okt-Mar);
- g. Peningkatan ketahanan pangan dan peningkatan ketahanan ekonomi menjadi permasalahan di Kabupaten Sumba Barat Daya. Peningkatan ketahanan pangan diselesaikan dengan penanaman jagung, sedangkan peningkatan ketahanan ekonomi dapat diselesaikan dengan mengintegrasikan antara pertanian dan peternakan (ternak unggas, ternak kecil, atau ternak besar). Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya diperoleh dalam waktu \pm 9-12 bulan. Instrumen ini diharapkan akan mampu menurunkan angka kemiskinan sekaligus menjamin ketahanan pangan masyarakat di Kabupaten Sumba Barat Daya;
- h. Hasil produktivitas di Kabupaten Sumba Barat Daya untuk 5 tongkol jagung setara dengan 1 kg. Populasi tanaman jagung ada 70 ribu sehingga rata-rata produktivitas per ha 12 ton. Harga saat ini berkisar Rp4.000,00/kg sehingga total keseluruhan mencapai Rp48 juta;
- i. Beberapa aspirasi yang disampaikan oleh Bupati Sumba Barat Daya dan beberapa petani, diantaranya:
 - 1) Lahan jagung di Kabupaten Sumba Barat Daya masih belum optimal produksinya karena benih yang digunakan tidak berkualitas;
 - 2) Pupuk menjadi kendala karena ketersediaannya sangat terbatas dan harganya tinggi. Program TJPS yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya mendapatkan bantuan modal usaha dari perbankan untuk pengadaan sarana dan prasarana produksi pertanian dimana harga pupuk yang ditebus oleh petani sama dengan harga pupuk yang dibeli oleh pengusaha kelapa sawit yaitu sekitar Rp13.500,00/kg. Oleh karena itu, Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya telah mengusulkan kepada PT Pupuk Indonesia untuk memberikan dispensasi/pemotongan harga pupuk;

- 3) Diharapkan harga pupuk nonsubsidi tidak terlalu tinggi;
- 4) Meminta dukungan sarana dan prasarana pertanian karena selama ini petani masih menggunakan cangkul (diharapkan ada traktor roda 4 karena selama ini pengadaannya hanya digunakan untuk lahan sawah);
- 5) Hama belalang merupakan bencana yang dapat menghabiskan tanaman jagung di Sumba Barat Daya. Oleh karena itu, petani meminta agar Pemerintah segera memberikan bantuan insektisida dalam mengatasi hama belalang;
- 6) Meminta Komisi IV DPR RI dan Pemerintah untuk menyampaikan kepada Bupati Sumba Timur agar Hama Belalang segera dimusnahkan dan diberi bantuan obat pembasmi hama belalang;
- 7) Waktu masuk musim hujan, petani mengalami kesulitan dalam pengeringan jagung sehingga meminta dukungan dari Komisi IV DPR RI dan Pemerintah untuk alat pengering jagung/*dryer* agar hadir di Kabupaten Sumba Barat Daya. Busuknya panen jagung di MP-1 (masuk musim hujan), menyebabkan petani sulit menjual jagung;
- 8) Meminta dukungan alat perontok dan alat tanam benih jagung;
- 9) Kelompok Bank Himbara (BRI masih kecil perannya, BNI dan Mandiri tidak ada) yang memberikan pembiayaan masih sangat rendah partisipasinya. Selama ini pembiayaan berasal dari bank lokal (Bank NTT) dan digunakan untuk pembiayaan sarana produksi;
- 10) Dalam mendukung keberlangsungan penanaman jagung di Kabupaten Sumba Barat Daya, masyarakat juga membutuhkan pembeli/pasar jagung; serta
- 11) Wilayah kecamatan Loura Kabupaten Sumba Barat Daya juga membutuhkan ketersediaan air.

Tanggapan Kementerian Pertanian

- a. *Corn Planter*, perontok jagung, dan *Dryer*, Kementerian Pertanian akan menyiapkan untuk Kabupaten Sumba Barat Daya; serta

- b. Hama Belalang, Kementerian Pertanian sudah melatih masyarakat Sumba Tengah dan Sumba Timur serta masyarakat Sumba Barat dan Sumba Barat Daya terkait dengan pengentasan hama belalang dengan menggunakan APH (Agensia Pengendali Hayati) melalui bakteri merah. Serangan termasuk kategori tinggi (rata-rata hampir 5.000 ha) terjadi sejak Tahun 2019. Sejak Januari-Mei 2022 sekitar 16 ton hama belalang ditangkap (jaring, mekanis, dan manual), penyemprotan dengan menggunakan insektisida, APH dengan menggunakan bakteri merah yang diharapkan dapat segera diaplikasikan, Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Universitas untuk menemukan APH dengan menggunakan racun asap cair yang dapat membuat telur tidak menetas/mandul, elisitor dengan menggunakan rumput (sudah diajarkan di 2 kabupaten/lulus 4 orang) yang dapat mengefisiensikan penggunaan pupuk karena perannya sebagai booster, menyebabkan tanah subur, terhidar dari hama penyakit, produksi tinggi, serta harga jual produk pertanian menjadi lebih bagus/tinggi.

Rekomendasi:

- a. Komisi IV DPR RI mengusulkan agar hama belalang dimanfaatkan untuk menjadi bahan pakan ternak;
- b. Komisi IV DPR RI mendukung penambahan alat mesin pertanian pascapanen sesuai dengan luas dan produksi pertanian yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya;
- c. Komisi IV DPR RI mendukung perbaikan sumber air melalui embung yang dikelola oleh Kementerian Pertanian;
- d. Anggota Komisi IV DPR RI akan menyuarakan aspirasi masyarakat yang bisa didorong melalui Komisi IV DPR RI;
- e. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah agar Tahun Anggaran 2023 dapat memberikan *dryer* kepada petani jagung Kabupaten Sumba Barat Daya; serta
- f. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk mengadakan Bimtek terkait dengan penggunaan KUR dan mengundang Bank Himbara

untuk turut serta berpartisipasi memberikan pendanaan kepada petani Kabupaten Sumba Barat Daya.

4. **Diskusi mengenai *Destructive Fishing* di Pulau Sumba, bertempat di Desa Radamata, Kec. Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya**

- a. Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki garis pantai sepanjang 96,7 km dan area perairan laut (<4 mil) seluas 716.798,080 m². Wilayah pesisir ini menjadi arena sosial dan sumber penghidupan masyarakat di 33 desa pesisir sekitarnya. Seperti kabupaten lainnya yang di Pulau Sumba, Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki aset alam yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai sumber penghidupan masyarakat di sekitarnya. Aset alam tersebut berupa ekosistem pesisir dan biota laut meliputi ekosistem mangrove, terumbu karang, padang lamun, biota laut, dan panorama pantai yang indah. Seluruh aset alam tersebut telah dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir, baik secara sosial (sumber pangan dan arena sosial), ekonomi (sumber pendapatan ekonomi), dan budaya (arena atraksi budaya/tradisi lokal). Namun potensi perikanan dan pariwisata bahari yang dimiliki belum dimanfaatkan dan dikembangkan secara optimal.
- b. Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan serta pengembangan pesisir dan laut adalah kurangnya kapasitas dan sumber daya manusia berupa pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman pemberdayaan yang dimiliki oleh masyarakat wilayah pesisir.
- c. Selanjutnya, terdapat ancaman terhadap kerusakan pesisir dan laut, kerentanan sosial, serta konflik sosial yang sedang terjadi maupun yang potensial terjadi. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat masih melakukan beberapa kegiatan ekonomi yang cenderung dapat merusak dan mengancam keberlanjutan pesisir dan laut, yaitu kegiatan penangkapan ikan yang dapat merusak sumber daya dan lingkungan (pemanfaatan teknik tradisional yang cenderung menginjak terumbu karang, mencongkel karang, penangkapan dengan bom oleh nelayan luar, maupun penangkapan biota laut yang dilindungi), disamping keterbatasan aset produksi dan teknik penangkapan yang dikuasai.

d. Destructive Fishing



BATASAN DESTRUCTIVE FISHING



KOMPLEKSITAS PERMASALAHAN DESTRUCTIVE FISHING



UPAYA YANG DILAKUKAN DIJEN PSDKP



- g. Beberapa aspirasi yang disampaikan oleh Wakil Nelayan Kabupaten Sumba Barat Daya dalam kesempatan diskusi adalah sebagai berikut:
- 1) Pokmaswas Humma
 - a) Permohonan bantuan sarana pengawasan bagi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, untuk melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan *iillegal fishing*.
 - b) Permohonan alat bantu selam untuk melaksanakan kegiatan penanaman karang.
 - c) Permohonan bantuan drone pengawasan.
 - d) Permohonan batuan Armada/Kapal Penangkap Ikan Fiber Kapasitas 1 GT beserta alat tangkap *gillnet mono filament 2,5 inch* dan *multi filament 2,5 inch*, untuk anggota kelompok pengawas.
 - e) Permohonan penempatan Satuan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya, agar permasalahan pengawasan dapat diselesaikan di tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya.
 - 2) KUB Pecinta Alam
 - a) Permohonan pengadaan rumpon bagi nelayan.
 - b) Permohonan bantuan pabrik es mini untuk persediaan es pada saat operasi penangkapan.
 - c) Permohonan bantuan *Cold Storage* untuk Desa Rada Mata.
 - d) Permohonan bantuan tempat tambatan perahu di Desa Rada Mata.
 - 3) KUB Nur Illahi
 - a) Permohonan perbaikan/rehab tambatan perahu yang ada.
 - b) Permohonan bantuan pabrik es mini untuk persediaan es pada saat operasi penangkapan.
 - c) Permohonan bantuan *Cold Storage* untuk Desa Pero Konda.
 - d) Permohonan bantuan alat tangkap cumi-cumi.
 - e) Permohonan bantuan alat tangkap *mini purse seine*.
 - f) Permohonan bantuan Armsda/Kapal Penangkap Ikan Fiber Kapasitas 1 GT.

- 4) KUB Raka Milla
 - a) Permohonan bantuan Armsda/Kapal Penangkap Ikan Fiber Kapasitas 1 GT.
 - b) Permohonan bantuan alat tangkap *gillnet mono filament* 2,5 inch.
 - c) Permohonan bantuan tempat tambatan perahu.
 - d) Permohonan bantuan mesin pompa air laut untuk pengembembangan usaha garam.
 - e) Permohonan bantuan bibit rumput laut dan tali untuk usaha rumput laut.

Rekomendasi:

- a. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk sesegera mungkin melakukan penyelesaian permasalahan *Destructive Fishing* di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya Pulau Sumba, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan sosialisasi serta peningkatan kapasitas masyarakat wilayah pesisir dalam rangka mencegah kegiatan *Destructive Fishing*.
- b. Komisi IV DPR RI akan mengawal realisasi bantuan/program aspirasi yang akan disampaikan oleh Bupati Sumba Barat Daya kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

IV. KESIMPULAN

1. Komisi IV DPR RI mendukung masyarakat program *Food Estate* mendapatkan bantuan sarana prasarana pertanian Tahun Anggaran 2023. Disamping itu, Komisi IV DPR RI juga mendukung adanya JUT dan JIT di kawasan Kabupaten Sumba Tengah dalam mendukung keberlangsungan program *Food Estate*.
2. Komisi IV DPR RI mendorong dilakukannya pemulihan ekosistem, baik kawasan konservasi oleh Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan

Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Balai Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti (Balai TN Matalawa), pada kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi oleh Ditjen Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Balai PDASRH Benain Noelmina.

3. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga ekosistem dan kawasan hutan di Pulau Sumba dalam rangka menjamin kualitas sumber daya air yang berguna bagi kelangsungan dan kesejahteraan masyarakat, baik generasi saat ini maupun generasi yang akan datang.
4. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindaklanjuti proses penegakan hukum atas seluruh tindak kejahatan perusakan hutan serta perdagangan ilegal satwa liar dilindungi di Pulau Sumba, agar dapat memberika efek jera, dalam rangka menjaga keanekaragaman sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan sosialisasi dalam rangka mencegah tindak pidana kejahatan perusakan hutan dan perdagangan illegal satwa liar dilindungi.
5. Komisi IV DPR RI akan mengawal realisasi bantuan/program aspirasi yang akan disampaikan oleh Bupati Sumba Barat kepada Mitra Komisi IV DPR RI, baik Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.
6. Komisi IV DPR RI mengusulkan agar hama belalang dimanfaatkan untuk menjadi bahan pakan ternak, mendukung penambahan alat mesin pertanian pasca panen sesuai dengan luas dan produksi pertanian, mendukung perbaikan sumber air yang dikelola oleh Kementerian Pertanian, meminta Pemerintah untuk mengadakan Bimtek terkait dengan penggunaan KUR dan mengundang Bank Himbara untuk turut serta berpartisipasi memberikan pendanaan kepada petani, serta mendorong Pemerintah agar Tahun

Anggaran 2023 dapat memberikan *dryer* kepada petani jagung Kabupaten Sumba Barat Daya.

7. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk sesegera mungkin melakukan penyelesaian permasalahan *Destructive Fishing* di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya Pulau Sumba, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan sosialisasi serta peningkatan kapasitas masyarakat wilayah pesisir dalam rangka mencegah kegiatan *Destructive Fishing*.
8. Komisi IV DPR RI akan mengawal realisasi bantuan/program aspirasi yang akan disampaikan oleh Bupati Sumba Barat Daya kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

V. PENUTUP

Demikian Laporan melaksanakan Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi dari beberapa pihak serta rekomendasi dalam Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat bersama Mitra Kerja Komisi IV DPR RI. Semoga kunjungan kerja ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, 22 Juli 2022

Ketua Tim,

Ttd.

EDWARD TANNUR, S.H.

A-52

LAMPIRAN DOKUMENTASI



**Peninjauan dan diskusi tentang *Food Estate*
di Lokasi RMU Desa Umbu Pabal Selatan, Kec. Umbu Ratu Nggay
Kab. Sumba Tengah**



Diskusi tentang Perdagangan Ilegal Satwa Jenis Burung Dilindungi serta Pemulihan Ekosistem dan Kawasan Hutan di Pulau Sumba di Desa Radamata, Kec. Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya



Peninjauan dan Diskusi tentang Wabah Hama Belalang dan Tanaman Jagung di Desa Hameli Ate, Kec. Kodi Utara Kab. Sumba Barat Daya



Diskusi tentang Permasalahan *Destructive Fishing* di Desa Radamata, Kec. Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya

LAMPIRAN MEDIA YANG MELIPUT

Komisi IV: Food Estate Sumba Tengah Tingkatkan Pertanian

INFO NASIONAL – Keberadaan sentra pangan atau food estate di Sumba Tengah berhasil meningkatkan produksi pertanian dari tahun ke tahun. Demikian temuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR yang dipimpin oleh Anggota Komisi IV DPR, Edward Tannur, saat menggelar pertemuan dengan Sekretaris Daerah Sumba Tengah pada Selasa, 13 Juli 2022.

Sebelum ada program food estate, hasil produksi jagung 2,5 ton per hektare. Kini meningkat menjadi 6 ton per hektare sejak ada proram food estate. Demikian pula untuk produksi padi, sebelum ada food estate hanya sekitar 3 ton per hektare, sekarang mengalami kenaikan produksi menjadi 4,7 ton atau 5 ton per hektare.

Adapun, penempatan lumbung pangan atau food estate di Sumba Tengah karena 34 persen angka kemiskinan ada di wilayah tersebut, di mana tingkat kemiskinan di NTT mencapai 16 persen.

Anggota Komisi IV DPR, Edward Tannur, berharap keberadaan food estate dapat mencukupi kebutuhan masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi angka kemiskinan. "Jadi harus diingat food estate untuk mempersiapkan ketahanan pangan nasional juga untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Kemudian dapat menghilangkan busung lapar, jika makanan cukup pasti rakyatnya akan sehat, negara kuat," ujarnya di Desa Umbu Pabal Selatan, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Sumba Tengah, NTT.

Komisi IV DPR juga sempat meninjau lokasi Mesin Pengering (Dryer) serta penggilingan padi atau Rice Milling Unit (RMU). Fasilitas tersebut diharapkan berguna bagi petani untuk mengolah proses mulai dari gabah hingga menjadi beras dengan efektif dan efisien dalam sekali alur. Unit ini dikelola bersama oleh gabungan kelompok tani (Gapoktan) bersama bernama 'Pro Oli Mila Parewa Tana'.

Namun tantangan terbesar di Sumba Tengah yakni kekurangan air. Dari penyampaian aspirasi, petani berharap Komisi IV DPR RI dapat membantu Sumba Tengah untuk mengatasi permasalahan kekurangan sumber daya air.

"Kekurangan yang mendasar itu sumber daya air jadi sementara aspirasi yang diserap pembangunan embung, tapi itu untuk mengatasi sementara. Kemudian yang permanen juga harus ada yaitu (membangun) bendungan, karena bendungan dapat

menampung debit air yang cukup besar dan dari air hujan juga bisa ditampung. Kemungkinan kalau ada air bisa panen setahun 2 sampai 3 kali, sekarang sudah susah, susai air jadi kekeringan," ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan dapil NTT II tersebut.

(Sumber:<https://nasional.tempo.co/read/1612468/komisi-iv-food-estate-sumba-tengah-tingkatkan-pertanian>)

Pertanian

1. <https://voi.id/en/news/190483/commission-iv-recess-to-central-sumba-finds-sad-facts-lack-of-water-resources>
2. <https://fakta.news/berita/komisi-iv-soroti-kekurangan-sumber-air-di-sumba-tengah>
3. <https://obligasi.id/sumber-air-di-sumba-tengah-kurang-komisi-iv-dpr-dorong-pembuatan-bendungan-323068.html>
4. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39805/t/Komisi+IV+Soroti+Kekurangan+Sumber+Air+di+Sumba+Tengah>
5. <https://www.jpnn.com/news/sumber-air-di-sumba-tengah-kurang-komisi-iv-dpr-dorong-pembuatan-bendungan>
6. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39848/t/Legislator+Komisi+IV+Harap+Ada+Solusi+Tepat+Atasi+Hama+Belalang+di+Sumba>
7. <https://pangannews.id/berita/1657951268/komisi-iv-dpr-ri-mendukung-langkah-cepat-kementan-kendalikan-belalang-kembara-di-sumba>
8. <https://infopublik.id/galeri/foto/detail/144237>
9. <https://selatanindonesia.com/2022/07/15/komisi-iv-dpr-ri-apresiasi-kesuksesan-food-estate-sumba-tengah/>
10. <https://infopublik.id/galeri/foto/detail/144274>
11. <https://infopublik.id/galeri/foto/detail/144276>
12. <https://infopublik.id/galeri/foto/detail/144278>
13. <https://monitor.co.id/2022/07/15/dpr-apresiasi-program-food-estate-di-sumba-tengah/>
14. <https://monitor.co.id/2022/07/16/komisi-iv-dpr-dukung-langkah-cepat-kementan-kendalikan-belalang-kembara-di-sumba/>
15. <https://www.tagar.id/legislator-komisi-iv-harap-ada-solusi-tepat-atasi-hama-belalang-di-sumba>

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1. <https://kupang.tribunnews.com/2022/07/15/kawasan-hutan-purnombu-rusak-parah-bupati-yohanis-bersama-anggota-komisi-iv-dpr-ri-tanam-pohon?page=2>
2. <https://sumbabaratkab.go.id/category/kegiatan-pimpinan/>